

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 litelatur Reviu

Tinjauan literatur (*literature review*) adalah sebuah proses kegiatan belajar serta membaca bahan pustaka, seperti buku, dokumen, prosedur penelitian dan evaluasi ataupun hasil penelitian relevan yang sudah dilakukan orang lain terdahulu, dan laporan hasil penelitian pengamatan dan temuan tentang masalah yang terkait dengan pokok masalah ini akan diteliti. Tujuan *literature review* ini sendiri ialah untuk mendapat pemahaman yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas yaitu terkait dengan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia pada pembentukan CPOPC (*Council of Palm Oil Producing Countries*) sebagai organisasi kelapa sawit dunia yang selanjutnya dibuat untuk memecahkan masalah yang dikaji yang kemudian diselaraskan dengan kerangka pemikiran ilmiah. Terkait dengan ini, penulis berupaya mengumpulkan data dari karya-karya sebelumnya yang terkait tema yang diusulkan, termasuk sumber-sumber dari buku-buku ilmiah, *scientific journals*, *research report*, siaran pers, skripsi, dan *official news*. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk menjadi acuan penulis dalam memperoleh informasi penelitian.

Pertama, dalam jurnal ilmiah yang berjudul **“MOTIVASI INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN MALAYSIA DALAM MEMBENTUK THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES (CPOPC) TAHUN 2015”** yang ditulis oleh Suherno Gunawan dari Universitas Riau (Gunawan & Rani, 2018). Memaparkan dan mendeskripsikan bahwa motivasi Indonesia menjalin kerjasama bersama Malaysia pada *The*

Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). CPOPC dibuat untuk beralih dari hubungan kompetitif ke kerjasama antar negara anggota. Sementara Indonesia memiliki keunggulan di pasar dan produksi minyak kelapa sawit mentah atau yang disebut CPO, Malaysia sudah menjadi pesaing tangguh sebelumnya di sektor kelapa sawit. Indonesia ataupun Malaysia adalah negara terbesar pada komoditas industri kelapa sawit global. Semisal digabungkan, target ekspor minyak kelapa sawit Indonesia-Malaysia menguasai 85-90% pasar global. Menyadari potensi yang dimiliki dua negara ini terhadap industri minyak kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia kemudian berinisiatif untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat dalam bidang kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat untuk pembentukan Dewan Negara Produsen Minyak Sawit atau lebih diketahui dengan sebutan *The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)*.

Indonesia yang sering dihadapkan pada masalah “miring” komoditas minyak kelapa sawit (terutama masalah terkait lingkungan), bakal diuntungkan dari kerjasama tersebut sebab diyakini mampu mengelaborasi rencana industri minyak kelapa sawit yang *eco-friendly*. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengubah kesan negatifnya di industri minyak sawit mentah global serta dapat membuka kesempatan pasar ekspor baru. Selain itu kerjasama CPOPC, Indonesia dapat bekerjasama dengan Malaysia untuk sejalan dengan itu memonitor perkembangan industri minyak kelapa sawit negara anggota, ataupun bisa berperan untuk memantau harga CPO dengan Malaysia.

Kedua, adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hanna P. Bayu yang berjudul **“INDONESIA AND MALAYSIA IN CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) FRAMEWORK TO IMPROVE PALM OIL COMPETITIVENESS IN THE EUROPEAN UNION MARKET”** (Bayu & Priangani, 2018). Memaparkan bahwa untuk menjaga dan mempertahankan salah satu komoditas strategisnya, Indonesia dan Malaysia awalnya bersaing di pasar minyak sawit mentah global bekerja sama membentuk *The Council*

of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Komite dibentuk dimaksudkan untuk memperkenalkan dan menambah daya saing minyak kelapa sawit yang cenderung mendapatkan perhatian kurang baik oleh negara lain, yang utamanya di Eropa. Selaku dua produsen minyak kelapa sawit global, Indonesia dan Malaysia condong pasif menetapkan harga ataupun standar minyak kelapa sawit, serta sering dikritik karena industri sawit dianggap tidak ramah lingkungan.

Di Uni Eropa, minyak sawit Indonesia dan Malaysia sering mendapat tekanan. Hal ini disebabkan persaingan di antara produsen minyak nabati Uni Eropa. Berbagai tudingan telah diluncurkan supaya mengurangi impor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa dari Indonesia dan Malaysia. Kampanye hitam menentang industri kelapa sawit tidak jarang terjadi.

Melalui CPOPC, Indonesia dan Malaysia berusaha menghentikan isu negatif dan berusaha menyelamatkan industri kelapa sawit di pasar internasional agar mampu bersaing dengan produk minyak nabati sejenis. CPOPC telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk seminar, diskusi dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di masing-masing negara. Hal ini untuk menjaga citra baik kelapa sawit dan tetap kompetitif di pasar global.

Ketiga, adalah jurnal ilmiah yang berjudul **“STRATEGI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI HAMBATAN NON-TARIFF BARRIER MINYAK SAWIT YANG DILAKUKAN UNI EROPA (2015-2019)”** yang ditulis oleh Bangkit Rohimah Pratiwi (Pratiwi, 2019). Memaparkan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua eksportir minyak kelapa sawit tertinggi di pasar internasional karena tingginya permintaan minyak kelapa sawit di pasar global. Minyak kelapa sawit sangat diminati, salah satunya datang dari Uni Eropa yang memanfaatkan minyak nabati untuk campuran membuat energi terbarukan yang disebut biofuel. Dari data *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), terlihat bahwa luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Indonesia

termasuk dalam penghasil kelapa sawit tertinggi di kawasan ASEAN dengan tingkat andil sebanyak 56,69% luas keseluruhan perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara. Sementara itu, Malaysia dengan tingkat kontribusinya yang sebesar 37,73%.

Namun, negara-negara di ASEAN, yang utamanya Indonesia dan Malaysia, menghadapi banyak masalah dalam proses impor dan ekspor minyak sawit mentah dengan Uni Eropa, termasuk gelombang hitam deforestasi yang diperparah dengan penerbitan dokumen. Resolusi Deforestasi Kelapa Sawit dan Hutan Hujan, yang memuat rekam jejak buruk masalah kelapa sawit di Asia Tenggara, karenanya menjadi tamparan berat bagi kedua negara penghasil kelapa sawit ini.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia ini diawali melalui pengembangan standar nasional yang disebut ISPO dan MSPO, yang merupakan standar sertifikasi nasional yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengembangkan keberlanjutan dan daya saing komoditas minyak kelapa sawit di kedua negara. Selanjutnya, upaya pembelaan kedua negara Indonesia-Malaysia, terlihat pada kerjasama pembentukan *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) yang merupakan hasil ataupun bukti nyata dari kolaborasi kedua negara dalam usahanya meluaskan daya saing industri minyak kelapa sawit mereka.

Tabel 2.1
Perbandingan Literatur Reviu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Suherno Gunawan	Motivasi Indonesia Bekerjasama Dengan Malaysia Dalam Membentuk <i>The Council Of Palm Oil Producing Countries</i> (CPOPC) Tahun 2015	Sama-sama membahas tentang motif kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam pembentukan <i>The Council Of Palm Oil Producing Countries</i> (CPOPC)	Selain untuk memperbaharui penelitian sebelumnya, penelitian yang dibuat oleh penulis ini juga akan membahas masalah bagaimana kondisi industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia
Hanna P. Bayu	Indonesia And Malaysia In CPOPC (Council Of Palm Oil Producing Countries) Framework To Improve Palm Oil Competitiveness In The European Union	Pada jurnal ilmiah ini sama-sama menganalisis bagaimana penguatan kerjasama yang dijalankan oleh Indonesia-Malaysia yang sebelumnya adalah kompetitor	Hasil dari penelitian yang ditulis lebih menekankan pada indikator peningkatan nilai ekspor minyak kelapa sawit ke Pasar Uni Eropa sementara itu penelitian yang dibuat oleh penulis

	Market	agar dapat mempromosikan dan meningkatkan daya saing minyak sawit yang cenderung mendapat perhatian negatif dari negara lain.	sendiri menjelaskan bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam pembentukan CPOPC sebagai organisasi minyak kelapa sawit dunia.
Bangkit Rohimah Pratiwi	Strategi Indonesia Dan Malaysia Dalam Menghadapi Hambatan Non-Tariff Barrier Minyak Sawit Yang Dilakukan Uni Eropa (2015-2019)	Kesamaannya terletak pada pembahasan bagaimana industri minyak kelapa sawit dapat menjadi industri yang berkelanjutan (SDGs).	Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Bangkit Rohimah Pratiwi ini fokus kajiannya adalah Hambatan Non-Tariff Barrier yang dilakukan Uni Eropa terhadap minyak sawit, sementara itu penelitian yang diteliti oleh penulis lebih berfokus terhadap pembentukan CPOPC sebagai organisasi minyak kelapa sawit dunia.

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pemahaman teori-teori untuk digunakan sebagai dasar pemikiran untuk melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan kerangka teoritis atau konseptual sebagai kerangka pemikiran supaya penelitian yang diteliti sinkron dengan jalur serta koridornya masing-masing. Dan juga bisa membantu penulis menerangkan dan menggambarkan beragam permasalahan ataupun analisis penelitian yang tengah berlangsung. Oleh sebab itulah, teori dan rancangan yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:

2.2.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional disebut sebagai perdagangan barang atau jasa antara negara yang berbeda. Perdagangan semacam ini berkontribusi dan meningkatkan perekonomian dunia. Komoditas yang paling banyak diperdagangkan adalah televisi, pakaian, mesin, barang modal, makanan, bahan baku, dan lain-lain.

Perdagangan internasional telah meningkat secara luar biasa yang mencakup jasa seperti transportasi luar negeri, perjalanan dan pariwisata, perbankan, pergudangan, komunikasi dan distribusi dan periklanan. Perkembangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan investasi asing dan hasil barang atau jasa asing di negara internasional (Marad, 2012).

2.2.1.1 Kebijakan Ekonomi Internasional

Kebijakan ekonomi internasional adalah respon pemerintah atau proses ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi struktur, arah dan bentuk perniagaan dan pembayaran global. Kebijakan ekonomi internasional itu sendiri mencakup: ketentuan perdagangan internasional, ketentuan pembayaran internasional, ketentuan bantuan luar

negeri. Sementara itu, skema kebijakan ekonomi internasional antara lain: swasembada, kesejahteraan nasional (welfare), perlindungan dan neraca pembayaran (Lilimantik, 2015).

2.2.1.2 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi berkaitan dengan isu-isu kebijakan ekonomi. Diplomat ekonomi mengawasi dan menyampaikan kebijakan ekonomi luar negeri dan memberi saran kepada pemerintah mereka tentang upaya terbaik dalam memengaruhi mereka. Diplomasi ekonomi memakai sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri tertentu, baik sebagai penghargaan atau sanksi. Tujuan diplomat ekonomi adalah untuk secara kompeten mempengaruhi kebijakan ekonomi multilateral dengan mengoordinasikan kementerian khusus, dengan membentuk proses negosiasi di organisasi penetapan standar ekonomi, dan dengan secara konstruktif mengikutsertakan aktor non-negara jika berguna dan sesuai. Tujuan diplomat komersial adalah untuk membuka pasar luar negeri bagi perusahaan asal mereka sendiri dengan mempengaruhi ekonomi pemerintah asing dan dengan memfasilitasi masuknya perusahaan nasional masing-masing ke pasar luar negeri dengan mudah (Saner & Yiu, 2006).

2.2.2 Kerjasama Bilateral

Sesuai dengan kata *bi* yang artinya adalah dua maka kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dijalankan oleh dua buah negara. Hubungan bilateral merupakan hubungan politik, budaya atau ekonomi antar dua buah negara. Secara umum, kerjasama internasional dijalankan secara bilateral, seperti kesepakatan politik dan ekonomi, alterasi kedutaan, pertukaran budaya ataupun saling lawatan antar negara. Terjadinya hubungan bilateral akan sangat mendorong dan mempersingkat proses kerjasama untuk menggapai kepentingan kedua negara.

Kerjasama bilateral biasanya memprioritaskan kerjasama ekonomi yang lebih erat, yaitu untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, untuk meningkatkan keamanan bersama, atau untuk mengembangkan pertukaran dalam budaya, pendidikan, pariwisata, atau bidang lainnya (Rana, 2018).

Tujuan diadakannya kerja sama ekonomi bilateral sebagai berikut: memenuhi permintaan dalam negeri, mengembangkan produktivitas dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja, memaksimalkan pendapatan nasional dengan ekspor, mempererat hubungan antar negara, menyumbang perekonomian negara, serta mempertahankan industri dalam negeri. Aspek kerjasama antar negara antara lain: kesamaan sumber daya alam dan kekayaan, disimilaritas aspek produksi, variasi jumlah penduduk, kesamaan nasib, juga kesamaan wilayah geografis.

Oleh karena itu, kerjasama bilateral merupakan suatu metode mewujudkan saling menguntungkan antara kedua negara di bidang ekonomi seperti perniagaan, penanaman modal, alterasi tenaga kerja, dan lain sebagainya, berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya, dengan tujuan pada kemampuan ekonomi kedua negara.

2.2.2.1 Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Malaysia

Malaysia dan Indonesia secara tradisional adalah negara tetangga di ASEAN dan berbagi latar belakang sejarah, bahasa, budaya, dan agama. Tidak bisa dibantah hubungan Malaysia-Indonesia sering dipengaruhi isu-isu terkini seperti wilayah perairan, imigran Indonesia, produk nasional, dan lain-lain. Indonesia adalah negara jiran yang memiliki kemiripan paling besar dengan Malaysia dibandingkan pada wilayah tetangga lainnya. Kesamaan nilai budaya, bahasa, dan agama antara Malaysia dan Indonesia disebabkan oleh faktor historis lingkungan alam Melayu yang melandasi hubungan kedua negara. Persamaan yang ada sudah membuat nilai emosional di antara penduduk kedua negara di masa lampau. Nilai tersebut juga

mengikat hubungan di antara mereka pasca awal kemerdekaan Malaysia maupun Indonesia ataupun di antara generasi kedua negara.

Sukar dipungkiri hubungan Malaysia dan Indonesia berulang kali dibuntuti oleh kepentingan nasional. Akan tetapi, kepentingan nasional dapat pula diandalkan untuk kerja sama Malaysia dan Indonesia. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga yang erat bersama penduduk masing-masing negara misalnya universitas atau perguruan tinggi, perusahaan pers, lembaga *entertainment*, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus mengencangkan upaya untuk menyebarkan pengetahuan dan pengertian di kalangan masyarakatnya bagi Malaysia maupun Indonesia. Langkah ini penting untuk membangun anggapan yang lebih baik terhadap kedua negara di kalangan generasi remaja yang berkomitmen untuk mempererat kerja sama Indonesia dan Malaysia guna membentuk atmosfer win-win bagi kedua negara (Ab Ghani et al., 2021).

Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia kini seharusnya memasuki babak baru, yang menghasilkan lebih banyak substansi untuk kedua negara. Kedua negara harus belajar dan menyadari bahwa faktor serumpun memiliki aspek positif dan negatif. Sampai taraf tertentu, elemen ini masih relevan dan jika mereka ingin menggunakannya sebagai kekuatan pemersatu, kedua negara dapat secara kreatif mengelola untuk menghasilkan hubungan yang konstruktif.

2.2.3 Kepentingan Nasional

Sebuah negara di dunia yang melakukan hubungan kerjasama bersama negara lain seyogyanya terdapat berbagai kepentingan yang bisa menyokong dalam pemenuhan kepentingan negaranya, lantaran keterbatasan sebuah negara dalam mencakup kebutuhan negaranya. Oleh sebab itu kerjasama antar negara ditujukan dalam memenuhi nasional interest negara masing-masing.

Kepentingan nasional pula dapat diartikan menjadi “identitas” (menurut konstruktivis), “institusionalisasi pasar” (liberalisme) maupun “pembentukan masyarakat internasional (English school)”. Dalam perspektif yang beragam ini, konsep "kepentingan nasional" selalu ada di ruang pertempuran, baik secara teori maupun praktik, bersifat kelompok dan belum final. Manifestasi “kepentingan nasional” dalam wilayah politik nasional amat tergantung pada ilmu pengetahuan apa yang dipakai oleh pembuat peraturan publik, dan apa dampak politik dari epistemologi tersebut (Rizky Mardhatillah Umar, 2017).

2.2.4 Minyak Kelapa Sawit

Sebuah negara mestinya memiliki komoditi unggulannya masing-masing. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas unggulan yang dihimpun oleh Indonesia dan Malaysia. Minyak sawit merupakan salah satu minyak yang paling tinggi digunakan dan diproduksi di dunia. Minyak yang terjangkau, gampang diproduksi, dan konstan ini dipakai dalam beraneka ragam pangan, alat rias, bahan untuk kebersihan, ataupun menjadi basis biofuel ataupun biodiesel. Sebagian besar minyak kelapa sawit dihasilkan di benua Asia, Afrika, ataupun Amerika Selatan lantaran pohon kelapa sawit memerlukan temperatur yang hangat, sinar matahari, dan intensitas hujan yang tinggi. Produksi minyak sawit global kuasai oleh Indonesia dan Malaysia (Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, 2007). Produksi gabungan kedua negara ini menyumbang 85-90% dari keseluruhan produksi minyak sawit global.

Seiring dengan peningkatan penduduk dunia, permintaan minyak kelapa sawit dunia cenderung bertambah, sehingga konsumsi produk-produk olahan minyak sawit seperti makanan dan kosmetika meningkat. Situasi tersebut tentunya berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia dan Malaysia, dari sisi kontribusi bagi pendapatan nasional, ataupun tingginya tenaga kerja yang diserap oleh industri, karena besarnya volume produk yang dapat dihasilkan. Komoditas ini juga dapat memajukan taraf hidup penduduk sekitaran perkebunan kelapa sawit yang proporsi masyarakat miskinnya jauh didasar angka kemiskinan nasional

dalam rupiah. Dapat dikatakan bahwa industri kelapa sawit diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2.5 Industri Yang Berkelanjutan

Tahap perkembangan modern menuntut adanya kegiatan industri untuk menghasilkan berbagai kebutuhan manusia. Suatu negara membutuhkan industri untuk menghasilkan segala macam hal yang nyaman bagi kehidupan masyarakat. Pada gilirannya, industri dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor industri mempunyai peran yang vital dalam pencapaian skema pembangunan, akan tetapi perlu diperhatikan tentang tantangan yang dihadapi bidang industri sekarang adalah konflik antara kegiatan industri dengan masalah lingkungan dan dampaknya terkait pada praktik pembangunan berkelanjutan.

Kini sudah terbentuk pertanyaan dan pendapat mengenai insiden kerusakan lingkungan pada wilayah kawasan industri, tuntutan dan perselisihan antara perusahaan dengan penduduk terkait bersama disparitas ketentraman dan potensi perusakan lingkungan, seperti cair, gas, maupun padat hasil kegiatan industri, dan masalah khusus terkait dependensi sumber daya mengolah air, pembangkitan energi dan pengawasan manajemen limbah industri yang berakibat pada keberlangsungan operasi industri.

Untuk mengurangi dampak perusahaan kepada lingkungan, diperlukan tanggung jawab seluruh pihak yang terkait dalam praktik industri untuk melestarikan lingkungan. Tindakan ini bertujuan supaya keturunan mendatang tidak merasakan kehancuran lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan manusia pada saat ini, pada hal tersebut perkembangan industri serta supaya usaha peningkatan taraf sosial ekonomi penduduk melewati industri tidak menimbulkan persoalan pada masa yang akan datang.

Pembangunan industri harus dilakukan dengan konsep “ramah lingkungan”. Ini mencuat merespon terhadap fenomena bahwa tren internasional saat ini penggunaan sumber daya

industri cenderung destruktif, lebih lagi di negara berkembang, hal ini disebabkan ketertinggalan teknologi, kapasitas sumber daya ataupun lemahnya kapabilitas dalam menjamin aktivitas produksi pada sektor *cleaner production*. Sehingga mesti dicetuskan rencana dan model kebijakan manajemen, pengaturan dan pengembangan wilayah industri dalam menjadikan wilayah industri (*Eco-Industrial Park*) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta pengembangan konsep industri hijau (*green industry*) (Dr. Ir. Fatah Sulaiman, 2016).

2.2.6 Daya Saing

Daya saing sebuah negara senantiasa melahirkan topik yang atraktif, seperti ekonomi, politik, sosial dan teknologi. Daya saing sebuah negara ibarat menjadi salah satu akar daya tahan suatu negara dalam menyongsong seluruh hambatan pada proses pembangunan peradaban negara. Peradaban cuma dapat diciptakan lewat intensitas politik, ekonomi, ataupun budaya yang terbaik. Perekonomian yang berdaya saing besar bisa menopang perkembangan ekonomi serta mulai menciptakan tatanan kegiatan berbangsa yang menjadi titik awal pembangunan peradaban. Persepsi daya saing bermula dari konsep keunggulan komparatif. Daya saing adalah kapabilitas untuk menciptakan penghasilan dan faktor ketenagakerjaan yang cenderung tinggi serta berkelanjutan di seluruh perusahaan, industri, wilayah, negara, atau untuk menghadapi kompetisi internasional (PKRB, 2014).

Menurut Michael E. Porter, terdapat sinergi antara pemerintah dan dunia industri pada peningkatkan daya saing suatu bangsa dalam pasar global. Keselarasan ini menyumbang dalam menyokong bagian-bagian vital yang menjadi keutamaan dalam persaingan. Ada empat tonggak pada pembentukan daya saing nasional. Awalnya merupakan keadaan faktor-faktor produksi selanjutnya permintaan dalam negeri dan industri pendukung terpaut serta karakter perusahaan (PKRB, 2014).

Pada dasarnya, jika suatu produk yang diproduksi atau dibuat memiliki lebih banyak barang daripada produk lain, maka daerah yang memiliki produk tersebut akan berhasil, sehingga harga manufaktur akan lebih tinggi. Oleh karena itu, ada banyak produk di pasar saat ini, dan daya saing untuk memenuhi persyaratan pengujian dan permintaan pasar relatif kuat. Komoditas minyak kelapa sawit Indonesia juga menunjukkan daya saing tinggi pada produk pertanian, meskipun menghadapi persaingan yang cukup besar dari minyak sawit Malaysia. Di pangsa bursa Cina yang peka akan harga, eksportir minyak kelapa sawit asal Indonesia memiliki kontrol bursa yang lebih besar daripada eksportir Malaysia, sementara di bursa Belanda yang kurang peka akan harga, eksportir minyak kelapa sawit asal Malaysia sedikit di depan eksportir Indonesia. Minyak kelapa sawit adalah produk yang relatif baru di pasar Belanda, sehingga masalah non-pasar (contohnya masalah lingkungan) mendominasi daripada masalah harga minyak kelapa sawit. Selain itu, minyak sawit harus bersaing dengan berbagai minyak nabati alternatif pengganti minyak kelapa sawit seperti minyak biji bunga matahari, minyak lobak, seta lainnya.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berlandaskan pemaparan yang sudah disebutkan di atas sehingga penulis menarik sebuah hipotesis penelitian menjadi: *“Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia pada pembentukan CPOPC akan menjadikan industri kelapa sawit menjadi industri yang berkelanjutan dan lebih bersaing di pasar global”*

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk mempermudah dalam melangsungkan konfirmasi atau pembuktian mengenai hipotesis yang telah diambil, oleh karena itu penulis menggambarkan verifikasi variabel dan indikator supaya hipotesis yang diambil bisa diverifikasi dengan menggunakan kerangka teoritik sebagai tolak ukur. Untuk verifikasi variabel dan indikator akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Verifikasi Variabel

Variabel Dalam Hipotesis	Indikator	Verifikasi
Variabel bebas: Kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam pembentukan CPOPC (<i>Council of Palm Oil Producing Countries</i>)	Terciptanya kesepakatan dan kesadaran kedua negara terhadap perkembangan sektor industri kelapa sawit	Indonesia dan Malaysia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, adalah bapak pendiri Dewan serta anggota CPOPC yang dibentuk pada tanggal 21 November 2015. Para menteri Malaysia-Indonesia bertemu untuk menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) untuk pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries. Menteri Perkebunan dan Komoditas Datuk Amar Douglas Uggah Embas memimpin delegasi Malaysia ke Pertemuan Tingkat Menteri tentang pembentukan CPOPC, sedangkan Indonesia diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan, kedua negara akan menjadi negara pendiri dewan tersebut. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk membentuk CPOPC pada konferensi antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak di Bogor, Indonesia pada 11

		<p>Oktober 2015.</p> <p>Sumber: Malaysia-Indonesia Muktamadkan MoU Penubuhan CPOPC - Niaga mStar</p>
<p>Variabel terikat:</p> <p>Akan menjadikan industri kelapa sawit menjadi industri yang berkelanjutan</p>	<p>1. Pengembangan kualitas industri minyak kelapa sawit menjadi industri yang berkelanjutan</p>	<p>Negara tetangga Malaysia berencana untuk menerapkan skema biodiesel wajib 20% atau B20 pada akhir tahun 2022, sementara Indonesia kini telah menerapkan skema biodiesel wajib 30% ataupun B30 dan justru bergerak mengarah pada tingkat B40. Penetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2022 telah disetujui dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2018. 150.K/EK.05/DJE/2021, tanggal 30 November 2021 terkait Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM)</p> <p>Sumber: RI Sudah Jalankan B30, Malaysia Baru Mau B20 di Akhir 2022! (cnbcindonesia.com)</p>
	<p>2. Upaya dalam menanggapi isu negatif industri minyak kelapa sawit</p>	<p>Pada IPOC 2017 di Nusa Dua Bali, pertemuan itu menyetujui langkah-langkah rencana yang bertujuan untuk mempererat kerja sama peningkatan kelapa sawit, yaitu konsolidasi ISPO dan MSPO, peningkatan penelitian dan pembaharuan kelapa sawit, pengembangan kerjasama industri mengarah kepada produksi bernilai lebih, serta perombakan berbagai</p>

		<p>peraturan ataupun cara yang mendorong pengembangan mutu produksi sawit supaya dapat berkompetitif pada pasar minyak nabati global. CPOPC pula menganalisis peraturan yang memojokan minyak kelapa sawit di kawasan Eropa. CPOPC akan bergerak merespon tindakan untuk menyikapi perlakuan memojokan industri kelapa sawit.</p> <p>Sumber: CPOPC Berjuang Melawan Isu Negatif Sawit - Majalah Sawit Indonesia Majalah Sawit Indonesia</p>
--	--	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian

